

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM  
DILINGKUNGAN POLRES TANJUNG PINANG**

---

**I. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

- a. Pelaksanaan reformasi birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik berkualitas.
- b. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan reformasi birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selain itu, Peraturan Menteri tersebut merupakan rujukan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun ZI Menuju WBK/WBBM.
- d. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, perizinan dan tata niaga; keuangan negara; dan penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi adalah tentang pembangunan ZI. Pembangunan ZI dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan ZI menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

- e. Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan ZI di lingkungan Polres Tanjung Pinang pada Penataan Sistem Manajemen SDM, maka Tim program III melaksanakan analisa evaluasi dan monitoring terhadap penempatan personel sesuai dengan Kompetensi / Dikbangspes yang dimiliki.

## **2. Dasar**

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 08 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Permenpan dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Menteri Aparatur Negara dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Nomor : KB/1/IV/2018 tanggal 6 April 2018 tentang tata cara Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani;
- d. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/8284/XII/REN.2.3./2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang laporan monitoring pelaksanaan penilaian Zona Integritas di lingkungan Polri Tahun 2020.
- e. Surat Perintah Kapolres Tanjung Pinang Nomor : Sprin / 206 / I / REN.2.3. /2022 tanggal Januari 2022 tentang susunan kelompok kerja Pembangunan, Penggerak dan Penilai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Polres Tanjung Pinang.

## **3. Maksud dan Tujuan**

- a. **Maksud**  
Maksud disusunnya laporan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah untuk sebagai laporan kepada Pimpinan tentang sejauh mana pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Polres Tanjung Pinang saat ini.
- b. **Tujuan**  
Tujuan dibuatnya laporan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan Zona Integritas.

#### 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Polres Tanjung Pinang meliputi kegiatan yang dilaksanakan dimasing-masing program.

#### 5. Tata Urut

- I. PENDAHULUAN
- II. PELAKSANAAN RENCANA AKSI
- III. HASIL YANG DICAPAI
- IV. PENUTUP

### II. PELAKSANAAN RENCANA AKSI

#### 6. Program 1 (Manajemen Perubahan)

Dalam rangka mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set) serta budaya kerja (culture set) masing-masing personel Polres Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Kerja pembangunan Zona Integritas menuju Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Polres Tanjung Pinang.
- b. Melaksanakan pemilihan dan penentuan anggota tim selain pimpinan yang dipilih
- c. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Polres Tanjung Pinang.
- d. Melaksanakan sosialisasi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Polres Tanjung Pinang dengan melakukan kegiatan sosialisasi pada saat pel pagi di Polres dan sosialisasi ke Polsek jajaran, Pemansangan spanduk/ banner dan melalui media sosial
- e. Melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Polres Tanjung Pinang
- f. Melibatkan seluruh personel Polres Tanjung pinang dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Polres Tanjung Pinang.

#### 7. Program 2 (Penataan Tatalaksana )

Dalam meningkatkan efisien dan efektivitas sistem proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Polres Tanjung Pinang, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja SDM di lingkungan Polres Tanjung pinang sebagai berikut :
  - 1) E- YANKES
  - 2) E-MENTAL
  - 3) E-ROHANI
  - 4) SDM UNGGUL
  - 5) SIPP NEW 2.0
  - 6) SIMAK BMN

- 7) SPAM
- 8) SPRIN
- 9) LHKPN
- 10) ABK ONLINE
- 11) ITK ONLINE
- 12) E-BAHAGIA

- b. Pembuatan dan Penerapan kinerja berdasarkan dengan SOP dimasing-masing Bag, Sat, Sie dan Polsek jajaran Polres Tanjung Pinang.
  - c. Melaksanakan keterbukaan informasi melalui media sosial
8. Program 3 ( penataan Sistem Manajemen SDM)  
Dalam meningkatkan profisionalisme SDM Personel pada Polres Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan pembinaan karir personel Polres Tanjung Pinang berdasarkan kompetensi yang dimiliki seperti mutasi jabatan dilingkungan Polres Tanjung Pinang secara transparan
  - b. Peningkatan kompetensi SDM personel Polres Tanjung Pinang dengan mengusulkan dan mengirimkan personel untuk mengikut program latihan di SPN dan Dikpangspes di Pusat pendidikan;
  - c. Peningkatan kualitas pendidikan dengan melaksanakan pengusulan untuk mengikuti beasiswa S2 maupun S3.
  - d. Melaksanakan penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja melalui aplikasi SMK online bagi personel Polri dan SKP bagi Personel PNS Polri secara periodik;
  - e. Penegakkan aturan disiplin / kode etik bagi personel yang melakukan kesalahan disiplin maupun kode etik
  - f. Melaksanakan update data informasi personel secara berkala pada aplikasi SIPP New 2.0.
9. Program 4 (Penguatan Akuntabilitas Kinerja)  
Dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri, Polres Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dengan melibatkan Pimpinan / Kapolres Tanjung Pinang
  - b. Melaksanakan penyusunan penetapan kinerja
  - c. Melaksanakan memantau pencapaian kinerja secara berkala
10. Program 5 ( Penguatan pengawasan)
- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara
  - b. Melaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi
  - c. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
  - d. Mengimplementasikan sistem pengawasan Internal Pemerintah
  - e. Mengimpelmentasikan kebijakan pengaduan masyarakat
  - f. Menerapkan sistem WBS
  - g. Menimpenetasikan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tupoksi
  - h. Pelaporan LHKPN
11. Program 6 ( Peningkatan pelayanan Publik)  
Dalam meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Polres Tanjung Pinang melaksanakan :

- a. Membuat dan mengimplementasikan kebijakan standar pelayanan
- b. Membuat Maklumat standar pelayanan
- c. Melakukan dan membuat perbaikan standar pelayanan dan SOP
- d. Membuat informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui media sosial
- e. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

### III. HASIL YANG DICAPAI

Pada pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Polres Tanjung Pinang telah dilaksanakan namun masih dibutuhkan perbaikan baik sarana dan prasarana maupun SDM.

### IV. PENUTUP

#### 12. Kesimpulan

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Polres Tanjung Pinang dapat dilaksanakan dengan baik namun perlunya perbaikan dari sarana dan prasarana .

#### 13. Saran

Dimohon kepada setiap penanggung jawab progam 1 s/d 6 agar aktif dalam memberikan inovasi yang dapat meningkatkan prestasi Polres Tanjung Pinang sehingga Polres Tanjung Pinang dapat memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Demikian Laporan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Polres Tanjung Pinang ini dibuat, guna dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan pimpinan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri yang lebih terarah di masa mendatang



Tanjungpinang, 8 Maret 2022

Ar. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG  
KABAG SUMDA

VERY EDULFANDRIA NOR  
KOMISARIS POLISI NRP. 64120094

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KEPULAUAN RIAU  
RESOR TANJUNG PINANG

---

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)  
DI LINGKUNGAN POLRES TANJUNG PINANG

---

1. Program 1 (Manajemen Perubahan)

a. Pengecekan urine personel Polres Tanjung Pinang



b. Pengecekan sikap tampang yang langsung dipimpin oleh Kapolres Tanjung Pinang



c. Melaksanakan penandatanganan pakta integritas oleh masing-masing personel





2. Program 2  
Proses pelaksanaan SOP di tempat pelayanan publik dilingkungan Polres Tanjung Pinang (terlampir)
3. Program 3
  - a) Meningkatkan kompetensi personel Polres Tanjung Pinang dengan melaksanakan pelatihan fungsi di masing-masing satuan fungsi (terlampir)
  - b) Seleksi personel yang akan diusulkan untuk mengikuti dikbangspes di pusdik



- c) Mengirimkan dan mengusulkan personel Polres Tanjung Pinang untuk mengikuti program latihan di SPN (terlampir)

- d) Mengusulkan pengisian jabatan kosong ke satuan atas sesuai dengan Perpol 2 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Polres dan Polsek (terlampir).
- e) Melaksanakan pemberian penghargaan kepada personel yang memiliki inovasi dan kreatifitas dalam pelaksanaan tugas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat



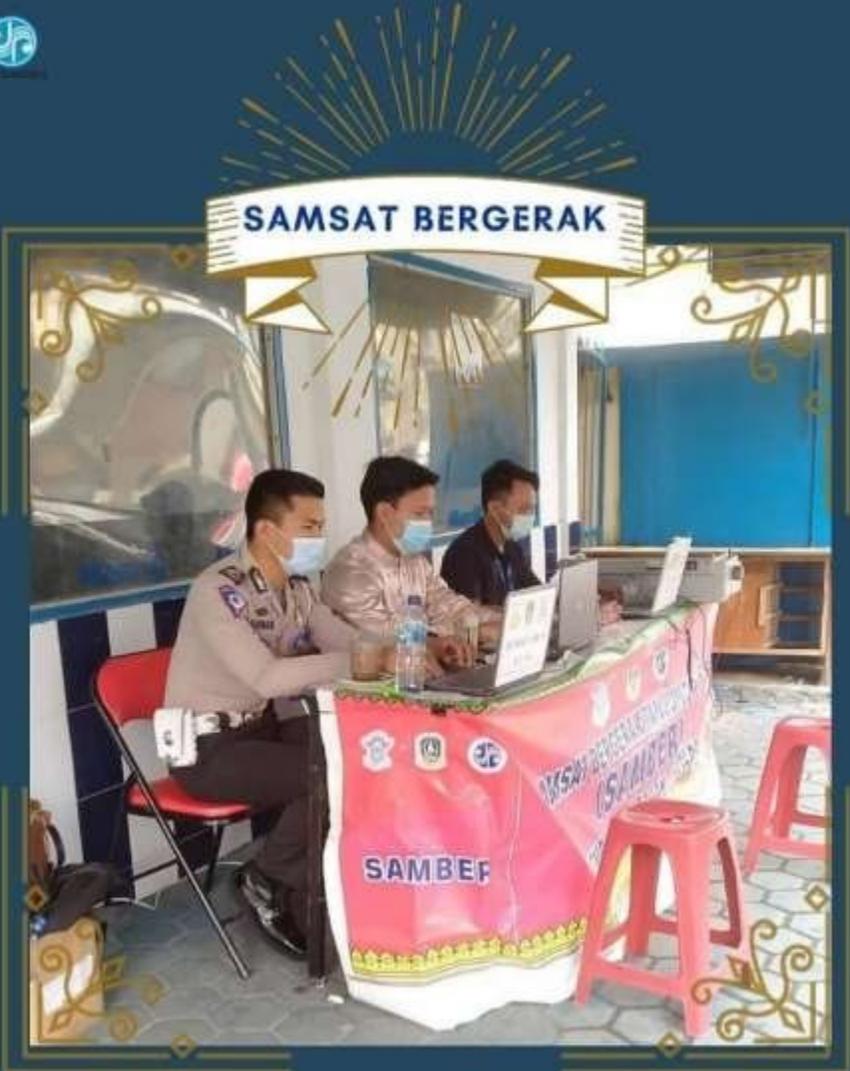
- 4. Program 4  
Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran dilingkungan Polres Tanjung Pinang



- 5. Program 5  
Melaksanakan peningkatan pengawasan terhadap pelayanan di polsek jajaran Polres Tanjung Pinang



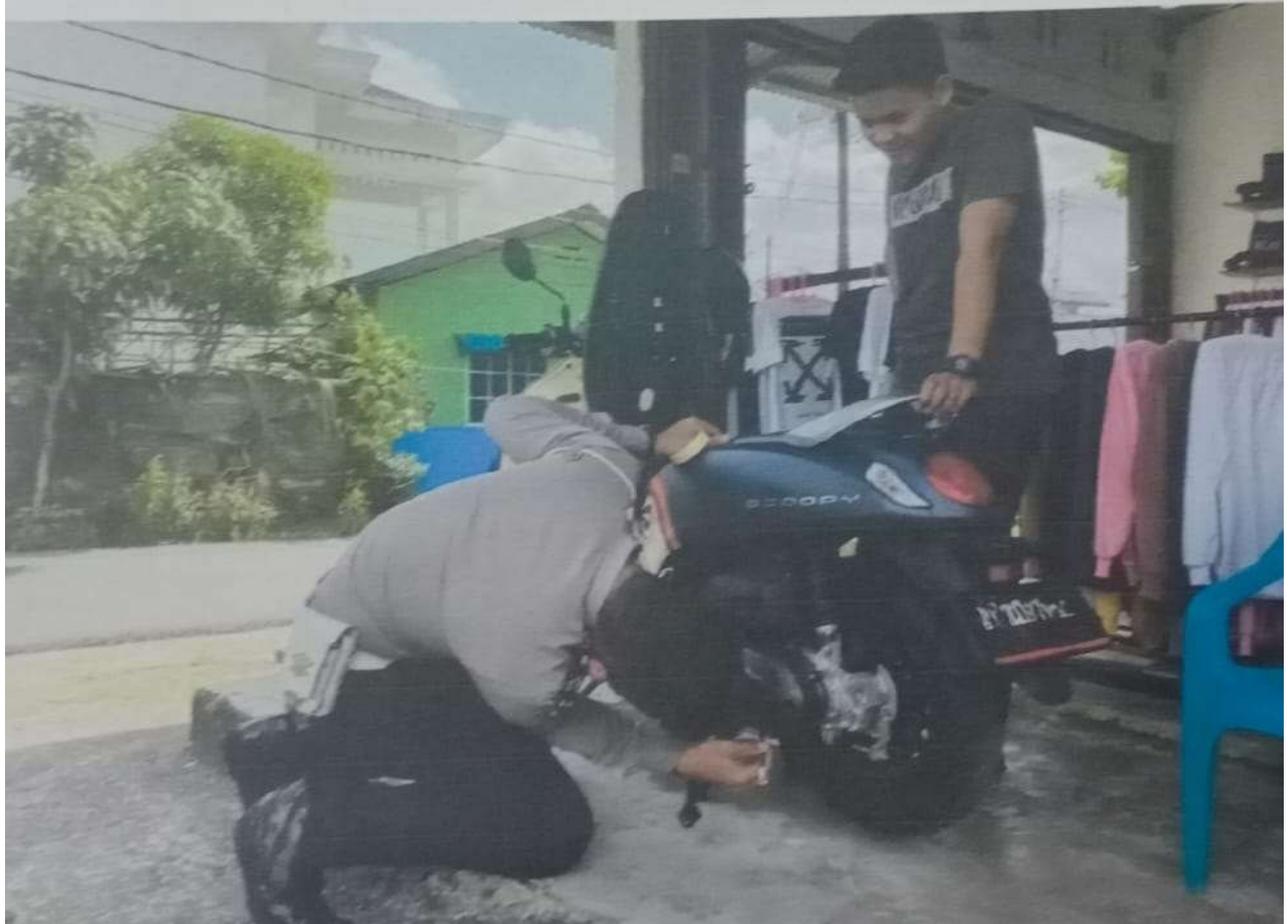
6. Program 6



The image shows a mobile SAMSAT (Vehicle Registration Office) booth. Three police officers in uniform are seated at a table covered with a pink and white banner that reads "SAMBEF". Above them is a sign that says "SAMSAT BERGERAK". The booth is decorated with gold and blue patterns. In the top left corner, there are three logos: the Indonesian National Police (Polda), the National Police (Polri), and the National Traffic Police (Ditlantas). Below the photo, a red location pin icon is followed by the text "Lokasi : Jl.Merdeka Pos Polisi Pasar 901" and "Jam Pelayanan : 08.00 s/d 15.00 WIB".

Lokasi : Jl.Merdeka Pos Polisi Pasar 901  
Jam Pelayanan : 08.00 s/d 15.00 WIB

CEK FISIK ON THE SPOT



STNK DELIVERY



Tanjungpinang, 8 Maret 2022  
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG PINANG  
KABAG SUMDA

VERY EDULFANDRIA NOR  
KOMISARIS POLISI NRP. 64120094